

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

TAHUN 2019

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
	1.3. Landasan Hukum	2
	1.4. Rencana Kerja.....	3
BAB II	METODOLOGI	5
	2.1. Metode Penelitian	5
	2.2. Populasi Dan Sampel.....	5
	2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
	2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
	2.5. Teknik Analisis Data	6
	2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
	3.1. Profil responden	9
	3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
	3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan .	17
	3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	17
BAB IV	PENUTUP	19
	4.1. Kesimpulan	19
	4.2. Rekomendasi	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas

Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 50 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks

Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Transaksi Rahasia
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Penyalahgunaan Jabatan

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Dasar dan Menengah.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	SD	1	1.89%
2	SLTP	3	5.66%
3	SLTA	17	32.08%
4	Diploma	10	18.87%
5	S1	15	28.3%
6	S2	6	11.32%
7	S3	1	1.89%
		53	100.01%

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 49.06 responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta memiliki pekerjaan sebagai Lainnya.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	PNS	3	5.66%
2	TNI	0	0%
3	POLRI	1	1.89%
4	SWASTA	11	20.75%

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
5	WIRUSAHA	10	18.87%
6	PELAJAR/MAHASISWA	2	3.77%
7	LAINNYA	26	49.06%
		53	100%

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada pada usia 29 tahun sampai dengan 39 tahun dengan jumlah 21 orang dari total 53 (39.62%).

Tabel 6.
Usia responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	18 Tahun s/d 28 Tahun	9	16.98%
2	29 Tahun s/d 39 Tahun	21	39.62%
3	40 Tahun s/d 49 Tahun	13	24.53%
4	Diatas 50 Tahun	10	18.87%
		53	100%

3.1.4. Layanan yang digunakan

Layanan Perdata menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar 50%.

Tabel 7.
Jenis layanan yang dipergunakan responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	PERDATA	50	94.34%
2	PIDANA	2	3.77%
3	HUKUM	1	1.89%

4	UMUM	0	0%
		53	100%

3.2. Indeks persepsi korupsi per indicator

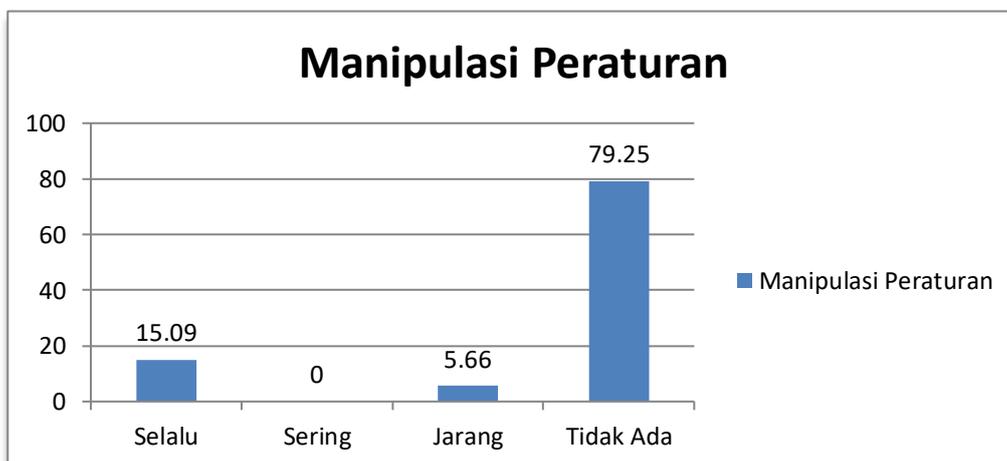
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.49.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta Bersih dari korupsi

Tabel 8.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan



3.2.2. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3.94.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta Bersih dari korupsi

Tabel 9.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3.92.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta Bersih dari korupsi.

Tabel 10

Indeks pada indikator menjual pengaruh



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

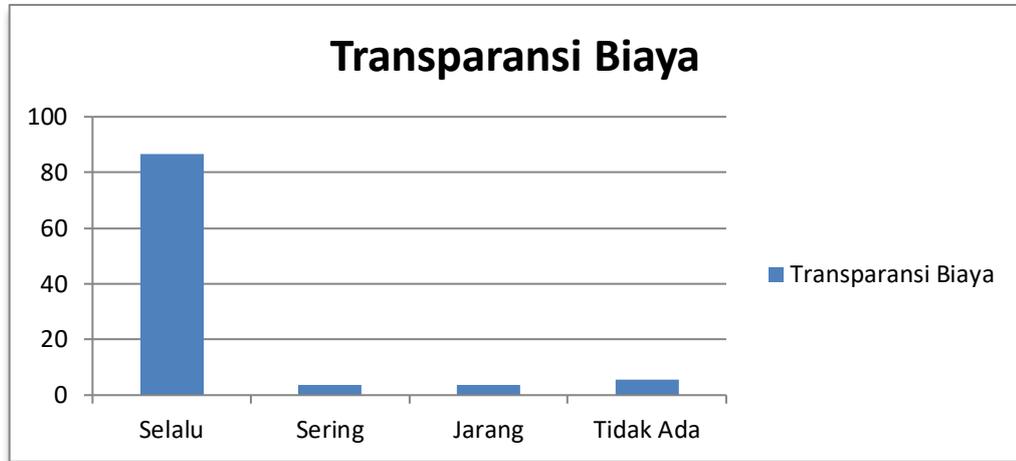
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3.72.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada

Pengadilan Negeri Purwakarta Bersih dari korupsi

Tabel 11.

Tabel indeks pada indikator Transparansi Biaya



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.49.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta Bersih dari korupsi

Tabel 12.

Indeks pada indikator tambahan biaya



3.2.6. Indikator Menerima Hadiah

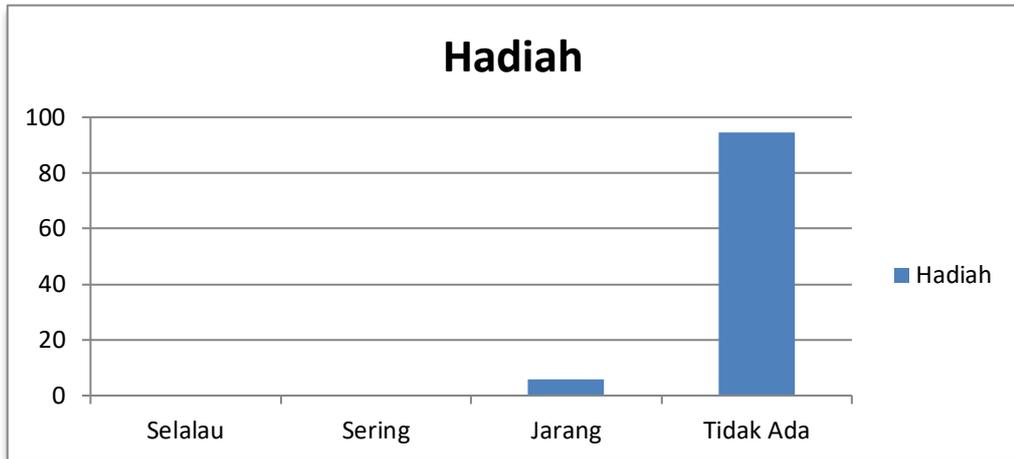
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator

Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3.94.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta Bersih dari korupsi

Tabel 13.

Indeks pada indikator menerima hadiah



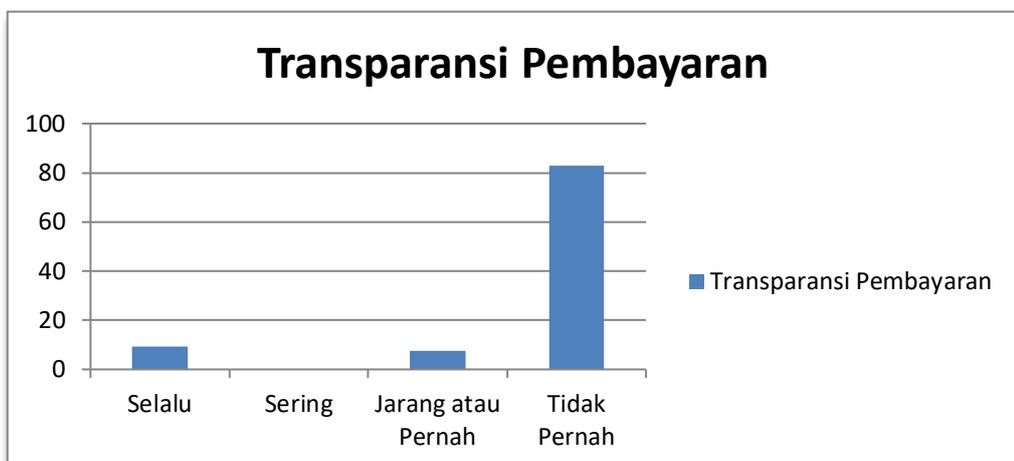
3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dariskala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 3.64.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta Bersih dari korupsi

Tabel 14.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran



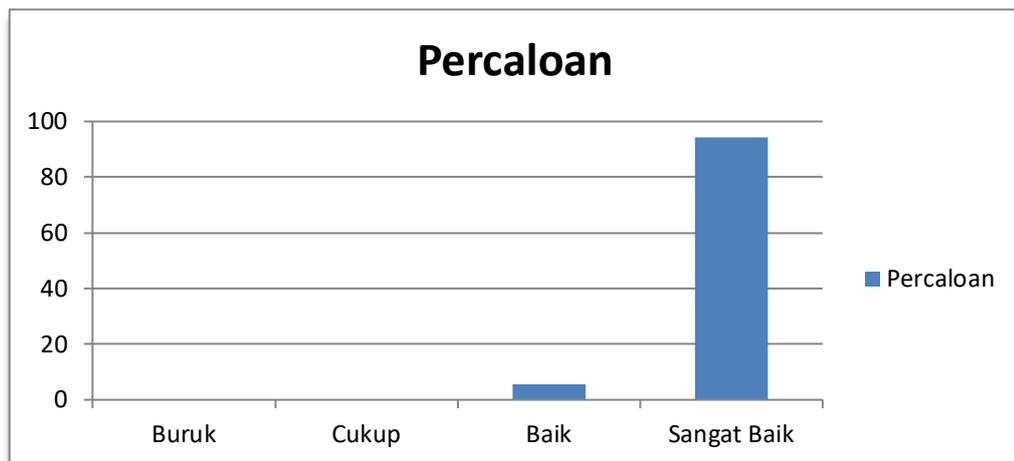
3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.94.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta Bersih dari korupsi.

Tabel 15.

Indeks pada indikator percaloan

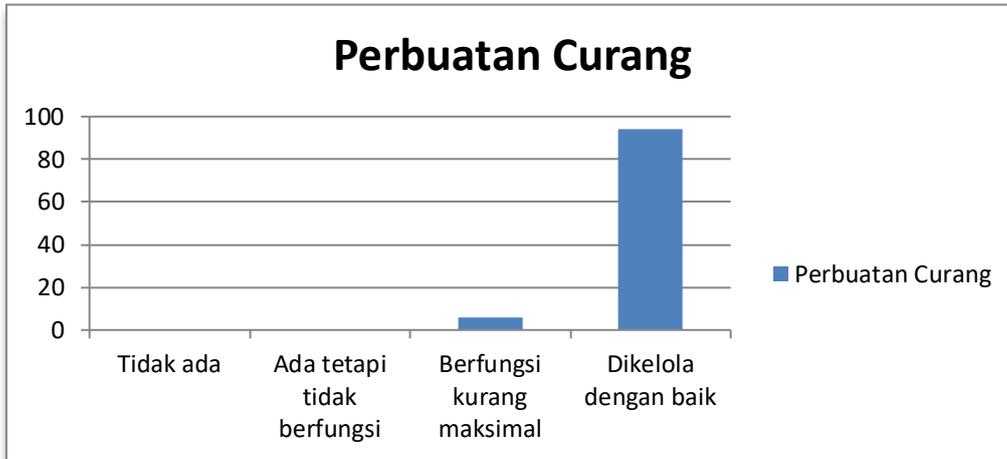


3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3.94.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta Bersih dari korupsi

Tabel 16.
Indeks pada indikator perbuatan curang



3.2.10. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.94.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta bersih dari Bersih dari korupsi

Tabel 17.
Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta.

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purwakarta sebesar 3.796, Indeks tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Bersih dari korupsi. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81.26-100

Tabel 20.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.51	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta.

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 21.

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Purwakarta**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purwakarta
1	Standard pelayanan prima agar terus ditingkatkan
2	Jadikan lembaga PN menjadin lembaga yang bebas dari KKN
3	Tetap menjaga pengadilan yang bersih dan transparan
4	Agar pelayanan semakin ditingkatkan
5	Pelayanannya sudah sangat baik

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purwakarta diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Purwakarta memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3.796 **atau** masuk pada kategori Bersih dari korupsi

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 79.25% **(Bersih dari korupsi)**.
2. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 94.34% **(Bersih dari korupsi)**.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 92.45% **(Bersih dari korupsi)**.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 86.79% **(Bersih dari korupsi)**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 79.25% **(Bersih dari korupsi)**
6. Indikator Menerima Hadiah, mendapat indeks 94.34% **(Bersih dari korupsi)**
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 83.02% **(Bersih dari korupsi)**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 94.34 **(Bersih dari korupsi)**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 94.34% **(Bersih dari korupsi)**
10. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 94.34% **(Bersih dari korupsi)**

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2019 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.796. atau masuk pada persepsi Bersih dari korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Manipulasi Peraturan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**JADWAL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB**

No	Kegiatan	2019											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Perencanaan												
	a. Penyusunan metode survei												
	b. Penyusunan instrumen survei												
2	Pelaksanaan												
	a. Pelaksanaan survei												
3	Pengkajian/Analisis												
	a. Penerimaan dan pengumpulan data												
	b. Pelaksanaan analisis												
4	Pendiseminasian												
	a. Pemaparan hasil akhir												
	b. Pembuatan laporan akhir												

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei						
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	Selalu	Sering	Jarang	Tidak ada	Kode Pengolahan	
(1)	2)	3)	4)	5)	(6)	
Eksternal						
1.	Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)	1	2	3	4	
2.	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)	1	2	3	4	
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual Pengaruh)	1	2	3	4	
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (Transaksi Biaya)	1	2	3	4	
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? (Biaya Tambahan)	1	2	3	4	
6.	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah)	1	2	3	4	
7.	Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya)	1	2	3	4	
8.	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? (Percaloan)	1	2	3	4	
9.	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang)	1	2	3	4	
10.	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan? (Transaksi Rahasia)	1	2	3	4	

PETUGAS PELAKSANA :

1. Petugas :

- Nama :.....
- Tanda Tangan :.....
- Tanggal Pelaksana :

2. Pencacah/Penghitung hasil survei :

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

3. Pengawas/Pemeriksa :

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :



**PENGOLAHAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB**

Jl. K. K. Singawinata No. 101 Purwakarta

Telp. (0264) 8222014 Fax. (0264) 200830

Website: <http://www.pn-purwakarta.go.id> - Email: info@pn-purwakarta.go.id

No	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	
10	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	1	4	4	1	4	4	4	
15	4	4	4	1	4	4	1	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	
18	1	4	3	2	4	4	1	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	1	4	1	4	4	4	
26	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	

27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
43	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
46	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
47	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51	1	4	4	1	4	4	4	4	4	4	
52	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	
53	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	
Jumlah	185	209	208	197	185	209	193	209	209	209	
NRR per RL	3,491	3,943	3,925	3,717	3,491	3,943	3,642	3,943	3,943	3,943	
NRR Tertimbang	0,349	0,394	0,392	0,372	0,349	0,394	0,364	0,394	0,394	0,394	3,798
IPK Unit Pelayanan										3,798	
Kategori A (Sangat Baik)											

Ruang Lingkup Pelayanan

No.	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan pelayanan	3,434	Sangat Baik
2	Prosedur pelayanan	3,358	Sangat Baik
3	Waktu pelayanan	3,151	Baik
4	Biaya/Tarif pelayanan	3,604	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis layanan	3,604	Sangat Baik
6	Kompetensi pelaksana	3,623	Sangat Baik
7	Perilaku pelaksana	3,566	Sangat Baik
8	Penanganan pengaduan	3,792	Sangat Ba
9	Sarana dan prasarana	3,434	Sangat Baik